

## MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, KEBIJAKAN DAERAH DAN PERAN ORMAS ISLAM DI INDONESIA

### ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, PROVINCE POLICY AND THE ROLE OF ISLAMIC CIVIL SOCIETY IN INDONESIA

Choirul Mahfud

Kepala Kelompok Riset Agama dan Perilaku Masyarakat UPM Soshum ITS Surabaya  
Email: mahfudjatim@yahoo.com

Diterima : 21 Oktober 2015; direvisi :19 November 2015 ; disetujui : 25 November 2015

#### ABSTRAK

*Kajian tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menarik perhatian banyak kalangan. Bukan saja dari para pejabat pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan menggunakan metode dokumentatif. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia terkait masyarakat ekonomi ASEAN? Bagaimana respon organisasi masyarakat Islam di Indonesia mengenai masyarakat ekonomi ASEAN? Lalu apa dan bagaimana peran organisasi masyarakat Islam dalam era masyarakat ekonomi ASEAN tersebut? Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk Pemprov. Jawa Timur, terkait masyarakat ekonomi ASEAN sangat responsif, antisipatif dan inspiratif. Beberapa daerah menunjukkan respon positif sekaligus diiringi kebijakan antisipatif melalui perencanaan hingga target sasaran yang diharapkan. Tidak sedikit langkah-langkah yang dilakukan sangat inspiratif melalui berbagai media dan buku. Kedua, respon Ormas Islam di Indonesia mengenai masyarakat ekonomi ASEAN juga cukup baik. Ketiga peran organisasi masyarakat Islam di Indonesia dalam era masyarakat ekonomi ASEAN seperti saat ini sangat signifikan, karena kuantitas umat muslim di negeri ini sangat banyak sekaligus jumlah organisasi Islamnya tidak sedikit yang berperan besar dari pra kemerdekaan sampai merdeka berlanjut hingga saat ini.*

**Kata Kunci:** Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kebijakan Daerah dan Ormas Islam

#### ABSTRACT

*The study of the ASEAN Economic Community (AEC) becomes an interesting topic for many people. Not only for central government officials, but also for local governments and Islamic Civil Society organizations (CSOs) in Indonesia. This study is a qualitative research that using descriptive approach and documentative method. The general objective of this study was to determine whether and how policies related to local governance in Indonesia and ASEAN economic community? How is the response of the organization of the Muslim community in Indonesia on ASEAN economic community? So what and how the role of Islamic civil society organizations in the era of ASEAN economic community? The results of this research are: First, the policy of the local government in Indonesia, including East Java government, related to the ASEAN economic community is very responsive, anticipatory and inspirational. Some areas show a positive response at the same time accompanied by anticipatory planning policies to target the expected goals. Not a few steps to do so inspiring through various media and books. Second, the response of Islamic Organizations in Indonesia on the topic of ASEAN economic community is so good. Third, the role of Indonesian Islamic society organizations in the ASEAN economic community is very significant, because the quantity of Muslims in this country are very much at the same time the number of Islamic organizations, not least the role of its in the pre-independence to independence of this country until now.*

**Keywords:** ASEAN Economic Community, Regional Policy and Islamic Organizations

## PENDAHULUAN

Daerah di seluruh Indonesia pada penghujung tahun 2015 ini akan turut merasakan babak baru era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Respon daerah yang diikuti kebijakan beserta organisasi masyarakat Islam sebagai elemen masyarakat sipil di negeri ini menarik dibahas. Bisa dikatakan bahwa era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bisa disebut sebagai salah satu tanda sekaligus simbol fenomena dunia yang terlihat datar, seolah terjadi negara tanpa jarak antara satu dengan yang lain. Tidak mengherankan bila Thomas L. Friedman dalam buku *The World Is Flat*, menyimpulkan bahwa dunia kini datar tanpa gelombang berarti (Thomas L. Friedman, 2005).

Firmanzah dalam buku *Globalisasi Sebuah Proses Dialektika Sistemik*, menyatakan bahwa orientasi dunia saat ini dan esok adalah globalisasi dimana kebutuhan dan keinginan masyarakat dunia ingin menjadi satu kesatuan sistem (Firmanzah, 2007). Masyarakat ekonomi ASEAN bisa dikatakan pula menjadi bagian penting dari apa yang disebut Firmanzah sebagai dialektika sistemik globalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara satu dengan negara lain di kawasan ASEAN dan dunia.

Potret kawasan ASEAN saat ini dijelaskan oleh Djauhari Oratmangun selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam buku *ASEAN Selayang Pandang*, bahwa hari ini ASEAN berbeda dengan sebelumnya. ASEAN kini menghadapi perkembangan kawasan global yang sangat dinamis. Kerja sama ASEAN, menurut Oratmangun, telah menuju tahapan baru yang lebih *integratif* dan berwawasan ke depan dengan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 (Ditjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 1999).

Lebih lanjut, Oratmangun menyatakan bahwa ASEAN juga telah memiliki Cetak Biru sebagai peta jalan (road map) untuk membentuk Komunitas ASEAN 2015 yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar Cetak Biru, yaitu Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Blueprint*), Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*).

Dalam tulisan ini, penelitian difokuskan pada bahasan pilar cetak biru yang kedua, yaitu terkait Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), kebijakan daerah dan respon Ormas Islam di Indonesia. Perlu juga diketahui bahwa dalam Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN ada beberapa program khusus yang dibahas secara khusus pula dalam berbagai kegiatan berikut ini: 1). Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN. 2). Dewan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN; 3). Dewan Kawasan Investasi ASEAN. 4). Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN. 5). Pertemuan Para Menteri ASEAN bidang Pertanian dan Kehutanan. 6). Pertemuan Para Menteri Energi ASEAN. 7). Pertemuan Para Menteri Mineral ASEAN. 8). Pertemuan Para Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ASEAN. 9). Pertemuan Para Menteri Telekomunikasi dan Informasi ASEAN. 10). Pertemuan Para Menteri Transportasi ASEAN. 11). Pertemuan Para Menteri Pariwisata ASEAN. 12). Kerja Sama Pembangunan Mekong Basin ASEAN. 13). Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (Ditjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 1999).

Melihat dinamika global di kawasan ASEAN tersebut, tentu saja diperlukan kajian kebijakan dari pusat hingga daerah serta perlunya langkah sinergi semua pihak. Sjamsul Arifin, dkk. dalam buku *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, menjelaskan pentingnya melakukan sinergi untuk menghadapi kompetisi tidak saja di level ASEAN, tetapi juga di level dunia. Apalagi, sebagai satu kawasan yang saling berdekatan, maka seyogyanya persoalan bangsa bisa diselesaikan bersama saling melindungi dan menguntungkan untuk kemandirian dan kemajuan bangsa (Sjamsul Arifin, 2008).

Kehadiran masyarakat ekonomi ASEAN tentu memiliki sejumlah peluang dan tantangan. Dalam buku "*Menuju ASEAN Economic Community 2015*" yang dikeluarkan Departemen Perdagangan Republik Indonesia ada 7 peluang bagi Indonesia. Peluang-peluang tersebut sebagai berikut: 1). Manfaat Integrasi Ekonomi. 2). Pasar Potensial Dunia. 3). Negara Pengekspor. 4). Negara Tujuan Investor. 5). Daya Saing. 6). Sektor Jasa yang terbuka. 7). Aliran Modal.

Terkait dengan tantangan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN diungkap dalam

buku laporan "Menuju ASEAN Economic Community 2015" yang dikeluarkan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, setidaknya ada 9 tantangan bagi Indonesia, diantaranya: 1). Laju Peningkatan Ekspor dan Impor secara internal dan eksternal. 2). Laju Inflasi. 3). Dampak Negatif Arus Modal yang Lebih Bebas. 4). Kesamaan Produk. 5). Daya Saing Sektor Prioritas Integrasi. 6). Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM). 7). Tingkat Perkembangan Ekonomi. 8). Kepentingan Nasional. 9). Kedaulatan Negara. Tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana mengoptimalkan peluang tersebut. Bila Indonesia tidak melakukan persiapan yang berarti maka Indonesia akan menjadi Negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya.

Kesuksesan dan kegagalan program masyarakat ekonomi ASEAN bergantung pada keseriusan pelaksanaan kebijakan di masing-masing negara, termasuk kebijakan di daerah pada masing-masing negara anggota ASEAN. Ratna Shofi Inayati dalam buku berjudul "33 Tahun ASEAN, Keberhasilan dan Kegagalan di Dalam Menuju ASEAN Vision 2020; Tantangan dan Inisiatif, mencatat beberapa aspek kesuksesan dan kegagalan ASEAN selama ini sangat ditentukan oleh partisipasi, kompetisi dan sinergi semua pihak (Ratna Shofi Inayati, 2000).

Sebagai salah satu pilar demokrasi, organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia sebagai bagian dari fakta sosial merupakan elemen masyarakat sipil yang memiliki potensi yang bisa dilibatkan sekaligus terlibat langsung dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Banyak sekali sumber daya manusia sekaligus sumber daya organisasi untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan kemaslahatan umat dan bangsa. Oleh karena itulah, tulisan ini melihat masalah terkait masyarakat ekonomi ASEAN bukanlah masalah tunggal berkaitan dengan ekonomi atau politik saja, melainkan juga berkaitan dengan masalah sosial keagamaan.

Dari uraian di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apa dan bagaimana kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia terkait masyarakat ekonomi ASEAN?
- b. Bagaimana respon organisasi masyarakat Islam di Indonesia mengenai masyarakat ekonomi ASEAN?

- c. Apa dan bagaimana peran organisasi masyarakat Islam dalam era masyarakat ekonomi ASEAN tersebut?

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam usaha untuk menempatkan kondisi-kondisi sinkronik dalam sebuah konteks diakronik, maka susunan penulisan riset ini didasarkan pada kronologi dan metodologi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berbasis pada studi kepustakaan. Mengutip pandangan Zainuddin Maliki yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif termasuk penelitian mikro, dan beroperasi di dalam ranah subyektif dengan sasaran membongkar dunia kesadaran individu dalam memberikan makna dunianya. Lebih lanjut, menurut Maliki, penelitian kualitatif bertumpu pada pendekatan *verstehen* peneliti sekaligus berusaha membongkar makna, interpretasi dan definisi individu terhadap realitas. Di sini, Maliki bermaksud menggarisbawahi betapa sentralnya peran peneliti dalam menafsirkan dan memahami problematika realitas di suatu masyarakat.

Robert C. Bogdan, dan Sari Knoop Biklen dalam buku *Qualitative Research*, mengungkap bahwa penelitian kualitatif semacam ini juga bisa dikategorikan sebagai penelitian pustaka (RC. Bogdan dan SK Biklen, 1992). Argumentasinya karena untuk memperoleh data yang akurat dan revelan, penelitian semacam ini menggunakan beberapa sumber kepustakaan diantaranya: buku, dokumentasi, informasi media massa, internet dan sumber lain yang relevan.

Dalam riset ini, teknik analisis data memakai teknik analisis kritis. Maksudnya persoalan masyarakat ekonomi ASEAN dikaji dalam optik kritik konstruktif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori untuk menyingkap masalah penelitian. Secara singkat, teori yang dipakai untuk melihat persoalan masyarakat ekonomi ASEAN tersebut, riset ini menggunakan teori *hegemoni Antonio Gramsci*. Inti teori *hegemoni* tersebut adalah soal kuasa pengaruh. Secara jelas, menurut Gramsci dikutip Umar S. Radic, teori hegemoni merupakan sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan yang mendiktekan seluruh cita rasa,

kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial (Umar S. Radic, 2013).

Nezar Patria dan Andi Arief dalam buku *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* mencatat bahwa teori hegemoni menurut Gramsci bekerja dengan dua tahap yaitu tahap dominasi dan tahap pengarahan/kepemimpinan. Biasanya, tahap dominasi yang paling sering dilakukan oleh negara melalui institusi-institusi kekuasaan seperti sekolah, universitas, modal, media dan lembaga-lembaga negara lainnya (Nezar Patria dan Andi Arief, 1999).

Ideologi melalui struktur kuasa pengaruh tersebut bagi *Gramsci* merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan negara menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat. Dalam optik *Gramsci*, dominasi merupakan awal hegemoni. Jika sudah melalui tahapan dominasi ini, maka tahap berikutnya tinggal mengarahkan sebuah bentuk ketundukan kelas yang didominasi kepada kelas yang mendominasi. Siapa yang mencoba melawan hegemoni dianggap orang yang tidak taat terhadap aturan, moral dan konsensus. Bahkan mungkin saja dianggap bagian dari penyelewengan dan pembangkangan.

Dalam konteks riset kebijakan daerah dalam masyarakat ekonomi ASEAN, teori hegemoni dipergunakan untuk melihat bagaimana hegemoni dipraktekkan oleh siapa saja dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Bagi pemerintah, hegemoni dipraktekkan dalam upaya merebut pengaruh dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Bagi organisasi masyarakat (Ormas) Islam, hegemoni bisa pula dilihat dari kiprah dan peran organisasi masyarakat Islam dalam struktur kekuasaan yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa *Gramsci* dikutip Eriyanto *Analisis Wacana* menyatakan dalam membangun teorinya, ia menekankan pada penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindak kekerasan (Eriyanto, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami era masyarakat ekonomi ASEAN sesungguhnya tidak lepas dari pembahasan kebijakan yang dibuat negara atau pemerintahan daerah. Sebagaimana diungkap

Thomas R. Dye dalam buku "*Understanding Public Policy*" dinyatakan bahwa "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*" yang berarti bahwa apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah merupakan sebuah kebijakan publik (Thomas R. Dye, 2011).

Harold Lasswell dalam bukunya yang terkenal berjudul *Politics: Who Gets What, When, How*, menjelaskan bahwa kebijakan merupakan produk politik suatu negara (Harold Lasswell, 1936).

Hadirnya kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) seperti pembuatan kebijakan negara pada umumnya juga bukan sesuatu tanpa rencana. Solichin Abdul Wahab dalam buku *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, melihat interkoneksi antara kebijakan satu dengan kebijakan lain merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam pembuatan sebuah kebijakan (Solichin A. Wahab, 1997). Hal yang sama diungkap M. Irfan Islamy dalam buku *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, bahwa apapun kebijakan tersebut dibuat, prinsip inti semua kebijakan tersebut tidak boleh dilupakan dan menyimpang jauh dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat suatu negara.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kebijakan ASEAN merupakan agenda terencana yang disepakati bersama oleh semua anggota ASEAN. Tentunya dibuat bukan untuk kepentingan sepihak, tetapi untuk kepentingan dan visi bersama. Di Indonesia, sebelum bersepakat adanya pasar bebas ASEAN, telah dimulai dulu kebijakan otonomi daerah. M. Ryaas Rasyid dalam buku *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kebijakan untuk penguatan kemandirian dan partisipasi daerah beserta masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Ryass Rasyid, 2002). Setelah adanya MEA, tidak lama lagi ada era pasar bebas yang bukan saja di tingkat ASEAN, tetapi juga di tingkat dunia.

Dalam konteks inilah, era masyarakat ekonomi ASEAN adalah babak pertengahan antara otonomi daerah dan pasar bebas dunia. Sama dengan otonomi daerah, pembahasan Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) terhitung sejak Desember 2015 ini ibarat dua sisi mata uang. Ada sisi peluang, ada pula sisi tantangan yang perlu diperhatikan bersama semua elemen

daerah dan bangsa. Keduanya sama-sama penting bagi kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju era pasar bebas dunia pada tahun 2020.

Dalam konteks inilah, wajar bila ada yang menanggapi MEA secara positif dan negatif. Pro-kontra adanya MEA merupakan tahap awal yang perlu dimaklumi, namun tetap perlu diperhatikan bersama. Pasalnya ibarat ujian sekolah, mau tidak mau akan dihadapi juga ujian tersebut. Dalam *reportase Liputan6.com*, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang menilai Indonesia dan negara lainnya sebetulnya juga belum terlalu siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Idealnya, menurutnya, Indonesia secara khusus seharusnya menguasai terlebih dahulu pasar di dalam negeri kemudian rambah pasar regional. Oesman menilai bahwa ketidaksiapan Indonesia menghadapi MEA begitu terlihat di daerah-daerah. Misalnya, bagaimana kondisi pasar-pasar daerah dengan masuknya barang impor nanti. Oesman mendorong agar setiap pemangku kepentingan menghidupkan pasar daerah. Tak hanya itu, hal tersebut bisa memproteksi ekonomi daerah dari serangan ekonomi luar negeri.

Hal berbeda ditunjukkan Pemprov. Jawa Timur. Sebagaimana diberitakan *Tempo.co* bahwa Provinsi Jawa Timur diklaim paling siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku pada pengujung 2015. Alasannya, posisi perdagangan luar negeri provinsi Jatim dengan negara-negara di ASEAN tercatat surplus. Menurut M. Sairi Hasbullah Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang dikutip *Tempo.co*, mencatat neraca perdagangan dominan provinsi ini ke lima negara ASEAN. Sairi mencontohkan, nilai *ekspor non-migas* Jawa Timur ke Malaysia pada Oktober 2014 sebesar US\$ 93,5 juta atau meningkat 9,65 persen dibanding pada September yang hanya US\$ 85,2 juta.

Bila dipahami dari teori *hegemoni Gramsci*, maka semua daerah di Indonesia dalam era masyarakat ekonomi ASEAN, mau tidak mau dan suka atau tidak suka, tentu saja akan melakukan upaya *hegemoni* dalam arti kuasa pengaruh. Sebagaimana dijelaskan Gramsci dikutip Umar S. Radic, hegemoni adalah sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang

dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan yang mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial (Umar S. Radic, 2013). Tentu saja, kebijakan daerah bergantung para pemimpinnya dalam melakukan hegemoni tersebut.

Dalam memahami praktik hegemoni di era masyarakat ekonomi ASEAN yang dipraktikkan dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan daerah bisa dilihat dari dua tahapan penting. Pasalnya, *hegemoni* dalam *optik Gramsci* tersebut memang bekerja dengan dua tahap utama yaitu tahap dominasi dan tahap pengarahan/kepemimpinan. Biasanya, tahap dominasi yang paling sering dilakukan oleh negara melalui institusi-institusi kekuasaan seperti sekolah, universitas, modal, media dan lembaga-lembaga negara lainnya. Lalu tahapan kepemimpinan dilakukan dalam praktik pengarahan seorang pemimpin kepada yang dipimpin (Nezar Patria dan Andi Arief, 1999).

Misalnya saja ketika Sairi menjelaskan untuk ekspor dari Januari-Oktober 2014 di Jatim, total senilai US\$ 891,2 juta atau naik 5,88 persen dibanding Januari-Oktober 2013 sebesar US\$ 814,6 juta. Dibanding ke Malaysia, menurutnya, perdagangan Jawa Timur ke Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam lebih meningkat. Dalam praktik kepemimpinan, ia menyatakan bahwa kita tidak perlu khawatir, karena Jawa Timur adalah salah satu pusat industri nasional. Namun penerapan *non-tariff barrier*, menurut dia, memungkinkan gerakan terobosan besar di bidang investasi oleh negara-negara tetangga, sehingga bisa mempengaruhi dominasi perdagangan. Itu sangat tergantung *agresivitas* masing-masing negara. Selain itu, inflasi Jawa Timur pada November 2014 sebesar 1,38 persen atau lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 1,50 persen. Sedangkan inflasi kalender secara kumulatif sebesar 5,27 persen dan perbandingan year-on-year 5,85 persen. Di sinilah, praktik hegemoni melalui pengarahan dan kepemimpinan berpengaruh terhadap kuasa itu sendiri.

Hal yang sama juga dipraktikkan manajemen Bank Papua yang menyatakan kesiapan menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan

penyatuan perbankan Internasional tahun 2020. Direktur Utama Bank Papua J Kafiari di Biak sebagaimana diberitakan *inilah.com* mengatakan, untuk menghadapi persaingan global MEA Bank Papua sudah membangun infrastruktur gedung di berbagai kabupaten, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan fasilitas teknologi informasi. Berdasarkan data Bank Papua hingga 2015 telah memiliki sebanyak 184 kantor pelayanan perbankan tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Toraja Utara, Sulsel, Surabaya, Jawa Timur, Makassar, Yogyakarta dan Jakarta serta beberapa daerah lain sedang dalam penajakan pembukaan kantor layanan bank Papua.

Dalam konteks inilah, bisa dipahami bahwa MEA merupakan peluang sekaligus tantangan bagi semua elemen dan *stakeholders* bangsa Indonesia untuk berbagi solusi sekaligus kompetisi menuju kebaikan dan kemajuan bangsa di tingkat ASEAN. Riant Nugroho dalam buku *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*, melihat bahwa maju mundurnya suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat atau bahkan yang tidak dibuat (Riant D. Nugroho, 2008). Dalam hal ini, pemerintahan daerah dapat berperan lebih besar juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat untuk merespons dan menangkap peluang masyarakat ekonomi ASEAN.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) merupakan satu tahapan globalisasi di tingkat regional yang berakhir pada titik globalisasi di tingkat global dalam masyarakat ekonomi dunia yang disebut pasar bebas dunia. Dalam hal ini, selain pemerintah, tentu saja elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia memiliki peran signifikan yang bisa menjadi kunci sukses perubahan dan perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, syaratnya tentu bila mau memberikan kontribusi selamanya. Peran negara dan daerah ikut berpengaruh pada optimalnya peran semua pihak.

#### A. MEA dan Kebijakan Daerah

Riant D. Nugroho dalam buku *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, mengungkap bahwa kebijakan publik yang dibuat suatu pemerintahan negara adalah hasil

formulasi dari evaluasi yang pada akhirnya siap diimplementasi pada level terkait (Riant D. Nugroho, 2003). Hal ini juga berlaku dalam memahami bagaimana kebijakan daerah terkait masyarakat ekonomi ASEAN.

Secara umum, respon kebijakan daerah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN diformulasi dengan penuh responsif, antisipatif dan inspiratif. Beberapa daerah menunjukkan respon yang baik sekaligus diiringi dengan kebijakan antisipatif melalui perencanaan hingga target sasaran yang diharapkan. Tidak sedikit langkah-langkah yang dilakukan sangat inspiratif melalui berbagai media dan buku.

Sebagaimana diberitakan belum lama ini, Gubernur Jatim Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo memiliki cara yang unik dan inspiratif, yakni *melaunching* buku berjudul 'Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka' di Hotel Mercure Surabaya. Cara dan gaya ini bisa dikatakan unik karena rasanya jarang sekali seorang Gubernur dengan kesibukan yang padat masih memikirkan cara yang tidak biasa dalam menyambut MEA 2015 dengan menerbitkan buku. Disebut inspiratif di sini karena bukunya berisi pemikiran, informasi, tips dan motivasi, sehingga sangat bermakna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Apa yang dilakukan Pakde Karwo merupakan gerakan struktural yang bisa menjadi inspirasi gerakan kultural di level bawah. Di dalam buku tersebut, Pakde Karwo memiliki maksud baik untuk mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersiap diri secara lahir batin dalam menghadapi MEA. Uniknya, ulasan tersebut bukan melulu soal motivasi dan teori, tetapi juga pengalaman praktis bagaimana cara dan upaya melakukan langkah-langkah mudah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta menekan kesenjangan antar wilayah, khususnya di Jawa Timur. Intinya, siapapun bisa berperan serta. Dari diri sendiri, keluarga, kolega, teman hingga masyarakat dan pejabat perlu bersatu padu berebut peran dalam membuka pintu gerbang pasar bebas menuju kesejahteraan dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan.

Dalam konteks inilah, disadari betapa pentingnya peran sumber daya manusia di dalam membuka pintu gerbang pasar bebas ASEAN serta memaksimalkannya demi kemanfaatan,

kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan MEA 2015 telah disepakati oleh seluruh negara ASEAN untuk membuka secara bebas tenaga kerja di 8 sektor jasa antar negara ASEAN. Delapan sektor jasa itu adalah *medical* (pengobatan atau dokter), *nurse* (perawat), *arsitektur, engineering* (tenaga ahli), *dental* (dokter gigi), *akunting, tenaga survei*, dan *tourisme* (pariwisata).

Melihat peluang dan kesempatan ini, tentu tidak mungkin kita diam dan hanya melihat perkembangan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, pemikiran, konsep dan inspirasi selalu diharapkan bisa menjadi titik awal kesadaran semua orang menuju masyarakat mandiri, kreatif, produktif dan sejahtera di era pasar bebas ASEAN. Dalam hal ini, peran pendidikan Islam sangat signifikan dalam berpartisipasi memberikan solusi, kontribusi dan aksi nyata bagi masyarakat di kawasan ASEAN dan dunia.

Dalam konteks inilah, kesiapan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 bukan hanya retorika semata. Diperlukan kesungguhan dan kerja keras dari Pemda untuk bersiap menghadapinya. Persoalan ini tidak bisa dianggap enteng dengan menganggap bahwa ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam menangkap peluang ekonomi saat diberlakukannya MEA akan lebih jitu jika dipersiapkan dan dijalankan dengan baik.

Secara umum, bisa dikatakan bahwa sejauh ini Pulau Jawa masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional sehingga terkesan mengerdilkan potensi daerah-daerah lainnya. Terlebih lagi pemerintah pusat dinilai belum mampu mengurai sentralitas kegiatan ekonomi agar terdistribusi ke daerah lain di luar Jawa yang secara geografis justru jauh lebih luas dan didukung sumber daya alam yang potensial.

Menurut Wakil Menteri Perindustrian, Alex SW Retraubun, ke depan, kontribusi wilayah di luar Pulau Jawa dalam memberikan sumbangannya terhadap nilai tambah sektor industri akan terus ditingkatkan dari 28% pada tahun 2013 menjadi sekitar 45% pada tahun 2035. Alex mengatakan, pembangunan industri nasional hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat berarti pasca krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009, dimana

industri pengolahan non-migas mampu tumbuh dan berkembang secara signifikan.

Namun untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis SDA diperlukan investasi yang tidak sedikit, karena untuk menarik investor pemerintah pusat maupun daerah perlu membangun lingkungan pendukung (*enablers*) yang berdaya saing tinggi. Dibutuhkan terobosan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan yang ada. Kuncinya adalah harus ada dukungan yang kuat dari Pemda untuk mewujudkannya.

Watampone dari Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diberitakan *bone.go.id*, mengharapkan semua daerah untuk lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan dalam kebijakan otonomi daerah. Daerah pun diminta mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah, guna menghadapi agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai pada akhir tahun 2015.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengajak segenap Pemerintahan daerah untuk merapatkan barisan dan bahu membahu menampilkan kinerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan publik. Di tengah-tengah kemajemukan di tingkat lokal, regional, dan nasional, otonomi daerah dituntut untuk memberikan pelayanan publik, guna mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan yang hakiki.

Mendagri menambahkan, kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan peluang bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing. Menurutnya, otonomi daerah menjadi faktor penguat bagi setiap daerah khususnya dalam mendorong keluarnya arus barang dan jasa dari daerah untuk bersaing di kancah regional Asia Tenggara. Lebih lanjut Mendagri mengatakan, meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat juga dapat meminimalisir berbagai pengaruh-pengaruh dari dalam dan luar negeri, seperti tindakan-tindakan radikalisme dan subversif yang dapat mengancam keamanan nasional, regional dan global.

Periset dan pengajar Pascasarjana Universitas Indonesia Martani Huseini mengatakan, MEA 2015 akan ditandai adanya

liberalisasi modal, jasa, dan investasi. Kemampuan manusia yang bersertifikasi dengan standar internasional menjadi penting untuk bekal berkompetisi. Sebagaimana diberitakan *madiunpos.com*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan sederet strategi pengembangan perekonomian dalam *masterplan Jatimnomics*. Rumusan pemikiran itu dipaparkan Gubernur Jatim Soekarwo di Universitas Airlangga, Surabaya. Belum lama ini, Pemerintah pusat meminta Pemprov Jatim melakukan sinkronisasi *Jatimnomics* tersebut dengan kebijakan pemerintah pusat.

Tanggapan pemerintah pusat terhadap *masterplan Jatimnomics* yang dikemukakan Gubernur Jatim Soekarwo di Kampus Unair itu disampaikan anggota staf khusus Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Sonny Hary B. Harmadi. Sebagaimana diberitakan *madiunpos.com* Sonny menyatakan rangkaian kebijakan Pemprov. Jatim itu harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, Sonny menilai peluang yang dapat digarap Jatim adalah dukungan kebijakan dan fasilitas bagi industri manufaktur khususnya transportasi kelautan, meningkatkan perdagangan ke Indonesia Timur, dan mengembangkan pariwisata kepulauan dan kelautan.

Sementara itu, Djoko Mursinto Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menyatakan sektor yang seharusnya lebih diperkuat Pemprov. Jatim dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah pariwisata. Menurutnya, Pemprov. Jatim harus bisa mengubah ekonomi yang potensial menjadi ekonomi riil. Satu dari semua hal yang paling prospektif adalah sektor pariwisata. Jatim punya 767 obyek wisata alam, budaya, dan belanja, tapi belum terpadu. Oleh karena itu, dibutuhkan keterkaitan dari semua pihak.

Hal berbeda tetapi sama juga dikemukakan oleh Gubernur Jatim dalam paparan *masterplan Jatimnomics*-nya yang menekankan pada peran perdagangan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menghadapi MEA 2015. Lebih lanjut, menurutnya, para pelaku industri makanan dan minuman di Jawa Timur diminta mengebut perisapan kualitas, standar, dan sumber daya manusia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Hal yang sama dikemukakan Ketua Gabungan Industri Makanan dan Minuman (Gapmmi)

Jatim Ypto W. Sinatra sebagaimana diberitakan *madiunpos.com*, bahwa industri makanan dan minuman (mamin) dapat menjadi tulang punggung provinsi saat MEA 2015 tiba. Apalagi, jumlah industri ini tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia. Tercatat ada sekitar 650 produsen mamin dari 700.000 UKM dan UMKM di Jatim. Ypto menilai masifnya pengusaha mamin di provinsi tersebut dapat menjadi peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas pangsa pasar saat MEA 2015. Dia juga menyebut UKM makanan dan minuman di Jatim selama ini menjadi salah satu sektor andalan dalam pengurangan pengangguran, kenaikan pendapatan domestik, dan berkontribusi banyak dalam memajukan perekonomian provinsi.

Selama ini, kata Ypto, produk makanan minuman di Jatim sudah banyak diekspor ke Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Timor Leste. Selain itu, juga telah menembus pasar China, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sejak 2014, sambungnya, produksi industri mamin di Jatim juga terus naik seiring dengan semakin dekatnya implementasi MEA. Atas dasar itu, dia yakin pada 2015 ini *omzet* penjualan mamin di pasar Asean dapat meroket.

Selain itu, sebagaimana diberitakan *harianterbit.com*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendorong upaya pemasaran produksi dengan semangat "AKIK" menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang berlangsung Desember 2015. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Mas Purnomo Hadi, semangat AKIK itu maksudnya Aktif, Kreatif, Inovatif dan Koordinatif. Ia menjelaskan, Aktif maksudnya bagaimana koperasi menjemput bola sehingga mampu memasarkan produk para anggotanya. Kemudian, Kreatif artinya bagaimana koperasi bisa mendorong anggota untuk lebih giat membaca peluang pasar. Selanjutnya, Inovatif yang harus dilakukan sehingga produk mereka mampu bersaing dengan gempuran produk UMKM dari negara ASEAN.

Sedangkan, koordinatif maksudnya harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah sehingga bisa selalu terpantau dan mendapatkan membekalan. Selain itu, menghadapi MEA yang dimulai akhir tahun ini, pihaknya juga

melakukan standarisasi produk dengan menggandeng lima pakar dari perguruan tinggi dan pelaku usaha. Menurut dia, dengan standarisasi ini produk dari anggota Koperasi bisa terstandar dengan baik sehingga dengan mudah bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Menurutnya, Dinas Koperasi sekarang juga telah mendirikan koperasi khusus pedagang retail, yakni bergerak untuk memesan mesin-mesin packaging modern. Nantinya, satu mesin untuk melayani banyak UMKM sehingga tidak terbebani dan produknya bisa lebih murah dengan kemasan bagus.

## B. MEA dan Respon Ormas Islam di Indonesia

Respon organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia pada umumnya memberikan respon positif mengenai masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Namun begitu bukan berarti tidak ada yang kontra. Ada beberapa kelompok minoritas masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan pasar bebas di era masyarakat ekonomi ASEAN yang bisa berdampak negatif pada tradisi budaya lokal serta adat istiadat yang ada hingga bahaya buruk neoliberalisme.

Ketua PMII Cabang Probolinggo Jatim dalam situs *nu.or.id* menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) perlu diwaspadai adanya gejala *neoliberalisme* di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang berbeda tetapi sama maksudnya diungkap dalam berbagai kajian yang digelar untuk menghadapinya. A. Malik Fajar dalam Pidato Milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, belum lama ini, menyatakan bahwa MEA tidak lain merupakan persaingan orang, selain barang. Menurutnya, Indonesia saat ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 jiwa dan bonus demografi usia produktif, akan menjadi pasar dan incaran sembilan negara anggota ASEAN. Menurutnya, hal tersebut yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Hal inilah yang harus menjadi fokus dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mendahadapi MEA ini, melalui pendidikan Sumber Daya Manusia.

Dunia ini, menurutnya, semakin terbuka dan bersaing untuk memposisikan diri agar berada di urutan terdepan, dalam menghasilkan karya-karya unggulan dan merebut setiap kesempatan serta peluang yang terbuka di pasar

kerja, pasar untuk berbagai jenis produk, jasa dan teknologi telah menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Persaingan bukan lagi sebatas dunia bisnis, investasi, industri dan ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan, kesenian dan kebudayaan.

Choirul Mahfud dalam buku *Politik Pendidikan Islam di Indonesia*, menjelaskan bahwa persoalan penting bangsa Indonesia bukan saja soal ekonomi dan politik saja, tetapi persoalan pendidikan yang mampu memberikan solusi danantisipasi masalah hari ini dan esok juga perlu terus memperoleh perhatian semua pihak, termasuk dari umat Islam di negeri ini (Choirul Mahfud, 2015).

Sebagaimana dijelaskan Malik Fajar belum lama ini, pendiri muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan jauh sebelum Indonesia merdeka berpandangan bahwa pendidikan merupakan nilai yang paling berharga untuk pegangan hidup di masa yang akan datang. Kaitannya dengan MEA ini, Prof. Malik Fajar, menyarankan agar dunia pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah terus berupaya dalam mencerdaskan bangsa melalui Al-Islam dan Nilai-nilai kemuhammadiyah.

Lebih dari itu, respon konkrit perlu terus diiringi dengan langkah nyata oleh semua pihak khususnya umat Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maju mundurnya bangsa ini dalam era masyarakat ekonomi ASEAN sangat ditentukan oleh negara dan semua pihak yang berada dalam sistem kekuasaan negara.

## C. MEA dan Peran Ormas Islam di Indonesia

Peran organisasi masyarakat Islam di Indonesia dalam era masyarakat ekonomi ASEAN seperti saat ini sangat signifikan, karena kuantitas umat muslim di negeri ini sangat banyak sekaligus jumlah organisasi Islamnya tidak sedikit yang berperan besar dari zaman pra kemerdekaan sampai merdeka berlanjut hingga saat ini. Peran utama Ormas Islam di Indonesia tentu saja mengarah kepada dua aspek: pertama, aspek berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqu al-khairat*), aspek ini jelas diperlukan bagi umat dan Ormas Islam di Indonesia agar senantiasa siap menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN yang penuh dengan kompetisi/persaingan; dan kedua, aspek bekerja sama dalam kebaikan (*wa ta'awanu ala al birri*), meski

siap bersaing, umat dan Ormas Islam di Indonesia juga harus siap untuk bekerjasama dalam kebaikan. Dengan bekerjasama, tujuan kebaikan lebih cepat tercapai dan sukses. Inilah dua hal yang perlu menjadi perhatian umat dan Ormas Islam dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang MEA.

Kita semua mafhum bahwa secara kuantitas ada sekitar 85 persen penduduk yang memeluk Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini termasuk negara dengan umat Muslim terbesar di dunia. Tokoh-tokoh Islam pun berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kini, untuk menguatkan lagi peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, belum lama ini Majelis Ulama Indonesia menginisiasi Kongres Umat Islam Indonesia VI di Yogyakarta. Kongres Ormas Islam Indonesia tersebut membahas tentang penguatan peran politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban. Dari kongres itu, dimaksudkan umat Islam di Indonesia untuk tidak terbawa oleh arus yang kurang baik dan mengarahkan sesuai tujuan berbangsa dan bernegara.

Ketua MUI Amidhan mengatakan, kongres Ormas Islam Indonesia dilaksanakan untuk menjawab masalah-masalah umat di masa kini dan masa depan sekaligus evaluasi program sebelumnya. Dari konteks inilah, materi kongres berfokus pada tiga hal krusial yang menjadi tantangan besar umat Islam, yaitu strategi politik Islam, penguatan ekonomi Islam dan lanskap peradaban Islam mencakup tata ruang dan filosofi spiritual.

Dalam hal ini, peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dalam menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta tantangan era globalisasi saat ini memang sangat penting. Meminjam ulasan Zainuddin Maliki dalam buku "Agama Priyayi" bahwa praktik agama ala priyayi bukanlah sesuatu yang salah seratus persen. Di banyak negara, praktik agama priyayi perlu dipahami dengan tujuan mulia. Maliki mengungkap pandangan Machiavellian bahwa para priyayi yang identik dengan penguasa boleh saja membawa agama dan simbol-simbolnya ke ranah kekuasaan dan dalam hal ini agama tersebut lebih sebagai sebuah instrument penopang kekuasaan, sehingga tujuan dan cita-cita tercapai. Di sinilah, peran Ormas Islam

seperti Muhammadiyah, NU dan ormas Islam lainnya juga sangat besar bagi negeri ini. Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri dalam diskusi bertajuk "Pemuda Daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" yang dilangsungkan di UIN Syarif Hidayatullah, tahun lalu, bahwa amal usaha Muhammadiyah yang meliputi kesehatan, pendidikan dan bakti sosial adalah yang paling besar di dunia. Pada perjalanan setelah merdeka, kegiatan mengisi republik itu tidak sedehana, NU dan Muhammadiyah bersatu untuk menyusun konstitusi kita. Selanjutnya di masa kini, menurut Syaiful, anak muda Indonesia harus bisa bersaing dalam menghadapi persaingan dengan dunia luar yang kian masif.

Sementara itu, dalam situs *satuislam.com*, Din Syamsuddin pada acara dialog ideologi, politik dan organisasi atau ideopolitor Pimpinan Muhammadiyah Regional IV menyampaikan prestasi Muhammadiyah. Prestasi Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat dengan turut andil mengisi bidang sosial memang telah banyak dilakukan. Namun, Muhammadiyah juga seharusnya memberikan peran yang lebih luas dalam menyelesaikan problematika bangsa dan negara. Peran yang dimaksud menurut Din adalah dakwah kebangsaan. Muhammadiyah mulai memasuki dakwah ini dengan melakukan judicial review terhadap berbagai Undang-Undang yang merugikan rakyat, umat dan bangsa. Selain itu, Muhammadiyah juga pernah melakukan judicial review UU migas yang penuh kartel dan mafia migas, dan juga mengeluarkan fatwa atau pemikiran agama tentang sumber daya air di Indonesia. Menurut Din, negara sudah keterlaluan memberikan hak pada swasta asing untuk mengeksploitasi, dan menjual air dalam bentuk kemasan. Misalnya adalah dominasi perusahaan Danone (Aqua) yang mengeksploitasi sumber mata air. Akibatnya, debit air terkuras habis, dan para petani menderita, karena tidak memiliki cadangan air untuk kebutuhan pertanahan, padahal pajak yang mereka bayarkan tidak seberapa.

Din berpesan agar Muhammadiyah terus mampu memberikan solusi bagi bangsa atas problematika seperti penguasaan air hanya pada segelintir orang. Semua itu adalah rangkaian ijtihad Muhammadiyah dalam menegakkan

jiha d kebangsaan untuk mencapai cita-cita proklamasi Indonesia. Di era masyarakat ekonomi ASEAN, dalam situ dakwatuna.com, tantangan dakwah Islam cukup besar, namun begitu juga ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Kita mafhum bahwa hakikat dakwah itu tidak mengenal ruang dan waktu, semestinya memberi kita penyadaran akan pentingnya mengoptimalkan semua misi dakwah dalam segala situasi kehidupan. Adapun umat muslim di Indonesia, sudah seharusnya menyiapkan segala perangkat yang membawa kita menapaki tangga kesuksesan tersebut..

Adapun misi dakwah kita ialah menyebarkan nilai Islam ke seluruh sektor kehidupan. Lalu jangan berpikir bahwa nilai Islam yang dimaksud, hanya kita wacanakan pada dimensi ide pemikiran. Tidak. Jauh lebih besar daripada itu. Penyebaran nilai yang dimaksud, ialah penyebaran nilai yang selalu kita konversikan ke dalam agenda kerja. Sehingga dari agenda kerja tersebut, lahirlah kebermanfaatan nyata yang dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Dalam situs *www.dakwatuna.com*, diungkap peran ideal sebagai respon antisipatif dalam menghadapi momen yang perlu diperankan di AEC (*Asean Economic Community*) sebagai sebuah momentum kerjasama ekonomi besar, yang dapat mengubah kehidupan seluruh masyarakat ASEAN. Adapun AEC ialah turunan dari *Asean Community*. Lalu, *Asean Community* sendiri terdiri dari 3 bentuk kerjasama; 1. *Asean Politic Security Community*, 2. *Asean Economic Community*, dan 3. *Asean Social Culture Community*.

Dari ketiga jenis kerjasama tersebut, AEC-lah yang memiliki pengaruh paling besar. Karena AEC mengusung bentuk kerjasama ekonomi dengan cara membuka arus perdagangan barang, jasa, dan tenaga kerja antar negara anggota ASEAN, sehingga arus perdagangan yang terjadi akan semakin deras dan kompetitif. Adapun keterbukaan pasar ini, tentu memberi peluang besar untuk terjadinya persaingan dunia kerja, dan asimilasi budaya. Termasuk pertukaran nilai-nilai norma masyarakat. Hingga pada akhirnya, fenomena AEC 2015 akan menuntut seluruh negara ASEAN untuk segera menguatkan nilai-nilai bela kenegaraannya masing-masing.

Jika berbicara mengenai peran teknis apa yang

dapat kita lakukan dalam usaha menyukkseskan misi dakwah kita di AEC 2015, *www.dakwatuna.com* menginformasikan setidaknya ada 3 agenda penting yang bisa dilakukan; Pertama, mempromosikan *Islamic Finance. Asean Economic Community* yang berakar dari sistem ekonomi kapitalis, pada dasarnya juga memiliki banyak empiris dengan *Islamic Finance*. Bahkan *Islamic Finance* saat ini, sudah dianggap menjadi solusi perekonomian dunia, bahkan oleh negara Barat sekalipun. Sehingga tak ayal jika negara besar seperti AS dan Inggris, saat ini sudah mulai mendirikan lembaga-lembaga khusus yang mengkaji sistem *Islamic Finance*. *Islamic Finance* sendiri cakupannya sangat luas. Adapun agenda kerja yang dapat kita lakukan pada AEC 2015 nanti, ialah; a. Mendorong pertumbuhan dan mengoptimalkan peran *Islamic Banking*, b. Mendorong pertumbuhan dan mengoptimalkan peran lembaga amal zakat, Infaq, shodaqoh & kemanusiaan. Dua kelembagaan tersebut, akan membuat peredaran harta menjadi semakin baik. Menjauhi banyak hal syubhat. Inilah jalan terbaik, jikalau kita belum bisa mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia yang banyak disebabkan oleh kerusakan moral individu.

Kedua, Mendorong *Entrepreneurship*. Menyambut masyarakat ekonomi ASEAN, hanya dapat dipersiapkan dengan peningkatan kualitas masyarakat Indonesianya terlebih dahulu. Mengenai kualitas tersebut, bisa dilakukan dengan *entrepreneurship education* yang melibatkan banyak objek.

Ketiga, Menjadikan Indonesia sebagai pusat halal ASEAN. Masyarakat ASEAN sebagian besarnya berpenduduk muslim. Apalagi penduduk Indonesia, yang berstatus sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jika kita membaca 2 permasalahan global saat ini, maka kita akan berfokus pada 2 permasalahan *global*; 1. *Food Security*, dan 2. *Energi Security*. Sehingga dengan adanya AEC 2015, kita bisa mendorong perdagangan sumber daya energi dan sumber daya makanan yang lebih berkualitas. Khususnya pada perdagangan makanan, kita bisa mendorong perdagangan makanan yang halal (status dan caranya) lagi thoyyib (baik untuk kesehatan) di dalam kegiatan perdagangan AEC.

Dalam konteks ini, menarik untuk mengembangkan ide *Chairperson Enciety Business*

Consult dan dosen ITS Surabaya, Kresnayana Yahya bahwa sudah seharusnya Pelaku UKM Perlu Bentuk Asosiasi Hadapi MEA ([www.encycity.co](http://www.encycity.co)). Bagi pengurus dan anggota organisasi masyarakat Islam di negeri ini, tentu bisa mengambil inspirasinya perlu untuk saling bekerja sama membentuk asosiasi dalam kaitannya untuk peduli dan perhatian pada bidang ekonomi, khususnya dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Hal ini bukanlah suatu hal yang utopia, mengingat banyaknya ormas Islam (seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Majelis Ulama Indonesia MUI) yang berperan sebagai pressure grup terhadap segala kebijakan pemerintah. Lebih dari itu juga, Ormas Islam bisa turut berkontribusi dalam percepatan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Ketiga agenda tersebut telah menyentuh 3 faktor utama penentu kesuksesan misi dakwah kita di bidang perekonomian. Agenda mempromosikan *Islamic Finance* yang berada pada tahap sistem, merupakan sektor kerangka konseptual. Mendorong *entrepreneurship* yang menjadi tahap peningkatan kualitas SDM, merupakan sektor subjek. Sedangkan peningkatan kualitas barang (khususnya makanan), merupakan sektor objek yang diperdagangkan pada AEC. Jika kita mendesain AEC dengan cara berpikir seperti ini, AEC 2015 tidak akan lagi kita persepsikan sebagai ancaman, tetapi dapat menjadi peluang besar bagi kita semua.

Muslimah Indonesia juga menggelar hajatan besar berupa Kongres Muslimah Indonesia. Acara yang baru pertama kali dilaksanakan itu digelar sebagai persiapan untuk menyongsong globalisasi, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif akan berlaku pada 2015 nanti. Selain itu kongres juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai tantangan yang kini dihadapi muslimah Indonesia. Secara umum kongres yang digelar di Bogor pada 7-9 Maret lalu mengambil tema "Revitalisasi Peran Muslimah Indonesia Menghadapi Globalisasi."

Ketua Pelaksana Kongres Muslimah Indonesia Hj Welya Safitri menyatakan bahwa menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, tujuan kegiatan ini juga untuk mengantisipasi dampak buruk kepada sebagian banyak muslimah yang dirugikan, terutama TKI/TKW. Menurutnya, jumlahnya 90 persen adalah

muslimah. Jika muslimah tidak bergerak dan tidak bersatu dengan yang lain hal tersebut (hal yang merugikan muslimah) terulang lagi. Welya mengakui sebenarnya SDM Indonesia cukup banyak yang mumpuni. Sayang, menurutnya, hingga kini belum banyak yang muncul ke permukaan.

JK Minta Perempuan Ormas Islam Indonesia Siap Hadapi MEA, saat menghadiri acara pembukaan konferensi besar (konbes) Fatayat NU ke XV di Gedung Kementerian Agama, di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya, berpesan kepada perempuan Ormas Islam untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan menghadapi MEA. Caranya adalah berusaha memberi solusi kepada para anggotanya untuk menjalankan profesinya, meningkatkan kemampuannya dan bekerja sama untuk meningkatkan keterampilan. Kesiapan Indonesia dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi era masyarakat ASEAN sangat diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi bangsa konsumen atas produk-produk negara lain, tetapi juga menjadi produsen yang bisa menjangkau pasar negara-negara lain.

Dalam menghadapi MEA 2015, pesantren juga diharapkan berkontribusi dengan membekali santri melalui program kewirausahaan. Direktur Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Mohsen sebagaimana diberitakan [republika.co.id](http://republika.co.id), mengatakan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 pesantren mempersiapkan diri dengan berbagai macam program. Tujuannya, harus berorientasi pada penguatan kemandirian pesantren melalui pengembangan program kewirausahaan. Ia menjelaskan, dengan program kewirausahaan maka para santri pondok pesantren memiliki keterampilan dengan mengembangkan berbagai usaha kemandirian ekonomi. Seperti perbankan, agrobisnis, argo industri dan lain sebagainya. Selain itu, program kewirausahaan ini dilakukan dalam rangka memberi kesiapan kepada pesantren agar tidak memiliki ketergantungan dengan pihak lain.

Selain program kewirausahaan, menurutnya, Kemenag juga mempersiapkan para santri pesantren agar memiliki keterampilan hidup. Sehingga santri pesantren memiliki kemampuan untuk bersaing. Artinya, pesantren mempersiapkan masa depan para santri dengan pelatihan

keterampilan, keahlian dan lain sebagainya. Menurutnya, di samping juga memiliki kemampuan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi tapi juga mempersiapkan diri keterampilan hidup bekal mereka nanti untuk bekerja. Jadi orientasi pada menjawab tantangan persaingan kerja. Ia menambahkan, Kemenag juga sedang melakukan pemetaan pondok pesantren untuk menciptakan pemerataan kesempatan. Hal itu dilakukan untuk menggali potensi yang ada. Misalnya melalui pengembangan pesantren bahari. Yakni pesantren yang mengangkat potensi yang ada di sekitar pesisir kelautan agar dapat memanfaatkan potensi yang ada.

Keberadaan masjid di Indonesia juga disinggung bisa memberikan pengaruh positif dalam menghadapi MEA. Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur H Saifullah Yusuf menilai keberhasilan manajemen Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS) meraih sertifikat ISO 9001:2008 membuktikan umat Islam sudah siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Menurutnya, kunci dari kesiapan menghadapi MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) atau globalisasi adalah standarisasi, sertifikasi, dan nasionalisme. ISO adalah salahsatu aspek standarisasi pelayanan yang bersifat global. Menurutnya, dengan ISO, maka di masjid ini juga tergolong masjid berstandar internasional sebagai tujuan wisata yang menarik. Masjid Cheng Hoo di Surabaya, Pandaan, Jember, Banyuwangi, Palembang, Kalimantan dan Purbalingga juga bisa menjadi daya tarik wisatawan di daerah di beberapa kota di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Peran umat muslim Tionghoa dalam pembangunan masjid Chenghoo di negeri ini tentu menjadi jembatan jalur sutera baru hubungan Indonesia-China/ Tiongkok.

*Last but not least*, peran Ormas Islam di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN jelas sangat signifikan bukan saja membantu pemerintah, tetapi juga menentukan arah masa depan umat dan bangsa. Oleh karena itu, peran-peran utama dan kreatif demi kepentingan bangsa tentu saja terus diharapkan semua pihak, khususnya umat Islam, masyarakat, bangsa dan dunia.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan: *Pertama*, kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk Pemprov. Jawa Timur, terkait masyarakat ekonomi ASEAN sangat responsif, antisipatif dan inspiratif. Beberapa daerah menunjukkan respon positif sekaligus diiringi kebijakan antisipatif melalui perencanaan hingga target sasaran yang diharapkan. Tidak sedikit langkah-langkah yang dilakukan sangat inspiratif melalui berbagai media dan buku. *Kedua*, respon Ormas Islam di Indonesia mengenai masyarakat ekonomi ASEAN juga cukup baik. *Ketiga* peran organisasi masyarakat Islam di Indonesia dalam era masyarakat ekonomi ASEAN seperti saat ini sangat signifikan, karena kuantitas umat muslim di negeri ini sangat banyak sekaligus jumlah organisasinya tidak sedikit yang berperan besar dari pra kemerdekaan sampai merdeka berlanjut hingga saat ini.

## REKOMENDASI

Dalam upaya untuk merespon sekaligus berperan dalam masyarakat ekonomi ASEAN, penulis menawarkan beberapa rekomendasi: pertama, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi sekaligus terobosan kebijakan yang kreatif, inovatif sekaligus partisipatif. Langkah ini penting kita lakukan untuk saling berbagi informasi sekaligus berbagi tugas, peran dan agenda antara apa yang seharusnya dilakukan oleh aparatur pemerintah dan elemen masyarakat sipil, termasuk yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) Islam. Kedua, pendekatan regulasi. Di sini, peran negara termasuk pemerintahan daerah perlu membuat regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendorong partisipasi aktif kreatif warga masyarakat dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Misalnya saja regulasi tentang produk makanan halal atau lainnya. Ketiga, media massa yang berperan dalam publikasi publik, juga diharapkan terus memberikan informasi peluang, tantangan sekaligus kritik saran kepada penyelenggara negara pemerintah dan warga masyarakat Indonesia untuk kebaikan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas.
- Anderson, James E. 1998. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston. Houghton Mifflin Company.
- Arifin, Samsul dkk. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- ASEAN, *A Roadmap for An ASEAN Community; 2009-2015*, Jakarta; ASEAN Secretariat, 2009
- Asian Development Bank. 2013. *The Road to ASEAN Financial Integration: A Combined Study On Assessing The Financial Landscape and Formulating Milestones For Monetary and Financial Integration In ASEAN*. Philippines. Asian Development Bank.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen, Sari Knoop. 1992. *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Method*. Boston. Allyn Bacon.
- Direktorat Kerjasama ASEAN. 1999. *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta. Ditjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*. Singapore. Longman.
- Eriyanto, 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta. LkiS.
- Firmanzah. 2007. *Globalisasi Sebuah Proses Dialektika Sistemik*. Jakarta. Yayasan Sad Satria Bakti.
- Friedman, Thomas L. 2005. *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century*. New York: Farar, Straus and Giroux.
- Islamy, M. Irfan, 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Lasswell, Harold. 1936. *Politics: Who Gets What, When, How*. New York. McGraw-Hill.
- Mahfud, Choirul. 2015. *Politik Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Maliki, Zainuddin, 2004. *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Nugroho, Riant D, 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Inayati, Ratna Shofi, 2000. *33 Tahun ASEAN, Keberhasilan dan Kegagalan di Dalam Menuju ASEAN Vision 2020; Tantangan dan Inisiatif*. Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI.
- Patria, Nezar dan Arief, Andi. 1999. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Rasyid, M. Ryaas, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta. CV. Eko Jaya.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

### B. Sumber Internet

- bone.go.id  
dakwatuna.com  
harianterbit.com  
liputan6.com  
madiunpos.com  
muhammadiyah.or.id  
nu.or.id  
republika.co.id  
satuislam.com  
tempo.co  
encycity.co